



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.bawas.mahkamahagung.go.id, informasi.bawas@mahkamahagung.go.id

Nomor : 3914/BP/PW.1.1.1/VII/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Uji Publik

Jakarta, 23 Juli 2026

Yth.

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

di -

Jakarta

Berkenaan dengan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK secara Mandiri Tahun 2026 Nomor 3901/BP/PW.1.1.1/VII/2026 dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1057/SEK/PW1.1.1/VI/2026 tentang Revisi Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan dan Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2026, Tim Penilai Internal Mahkamah Agung akan melaksanakan Uji Publik sebagai bagian dari tahapan evaluasi Pembangunan Zona Integritas. Uji Publik ini bertujuan untuk memperoleh masukan, persepsi, dan informasi dari masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap satuan kerja yang diusulkan memperoleh predikat Menuju WBK secara Mandiri Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon agar pelaksanaan Uji Publik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Uji Publik ini hanya dilaksanakan pada satuan kerja yang telah dinyatakan **“LULUS”** seleksi administrasi usulan pembangunan ZI menuju WBK secara mandiri tahun 2026.
2. Setiap satuan kerja wajib mempublikasikan tautan Uji Publik melalui situs web resmi satuan kerja, media sosial resmi (apabila tersedia), papan pengumuman dan media informasi lainnya dengan menyampaikan ajakan sebagai berikut:
“Mari dukung kami dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dengan berpartisipasi mengisi kuesioner Uji Publik”
melalui tautan: <https://bawasmari.mahkamahagung.go.id/survey/>
3. Publikasi Uji Publik dilaksanakan sejak tanggal 23 Juli s.d. 15 September 2026.
4. Hasil pengisian kuesioner akan terekam secara otomatis pada sistem, sehingga satuan kerja hanya perlu memastikan pelaksanaan Uji Publik telah



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE

dipublikasikan secara luas sesuai ketentuan pada angka 2.

5. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan Uji Publik ini, kami harap Saudara berkenan meneruskan surat ini kepada seluruh satuan kerja yang dinyatakan lulus seleksi administrasi di lingkungan peradilan masing-masing, serta melakukan pemantauan atas pelaksanaannya.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI,
Ditandatangani Secara Elektronik



Muh. Djauhar Setyadi

Tembusan:

1. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.